

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL AGROFORESTRI II

**PERLUASAN PROMOSI AGROFORESTRI DALAM MENDUKUNG
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI ASIA TENGARA**
*(Scaling-Up Agroforestry Promotion Toward Climate Change
Mitigation In Southeast Asia (SAPSEA))*



**Universitas Mataram
Universitas Lampung**

**The Southeast Asian Network For Agroforestry Education
The Indonesia Network Agroforestry Education**

2010

Judul :

**PERLUASAN PROMOSI AGROFORESTRI DALAM MENDUKUNG MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM DI ASIA TENGGARA**
*(Scaling-Up Agroforestry Promotion Towards Climate Change Mitigation
In Southeast Asia (SAPSEA))*

ISBN : 978-602-8616-34-8

Diterbitkan Oleh :

Penerbit dan Percetakan
Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Dipublikasikan tahun 2010

Cara Pengutipan

Qurniati, R. 2010. Perluasan Promosi Agroforestri dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di Asia Tenggara (*Scaling-Up Agroforestry Promotion Towards Climate Change Mitigation in Southeast Asia (SAPSEA)*). Prosiding Seminar Nasional Agroforestri II. Seminar dilaksanakan pada 27 Januari 2010 di Universitas Mataram. Mataram.

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan dan kemampuan yang diberikan-Nya untuk menyelesaikan Prosiding Seminar Nasional Agroforestri II dengan tema "Perluasan Promosi Agroforestri dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di Asia Tenggara (*Scaling-up Agroforestry Promotion Towards Climate Change Mitigation in Southeast Asia (SAPSEA)*)" yang diselenggarakan pada 27 Januari 2010 di Universitas Mataram. Seminar ini terselenggara berkat kerjasama yang harmonis antara Universitas Mataram, Universitas Lampung, INAFE, SEANAFE, PAFERN dan APN.

Prosiding terdiri dari 30 makalah yang terdiri dari 3 topik yaitu : (1). Aspek Biofisik dari Sistem Agroforestry dalam mendukung mitigasi perubahan iklim Aspek Sosial, (2). Ekonomi dan Kebijakan di bidang Agroforestry dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim dan (3). Keanekaragaman hayati dalam sistem Agroforestry yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

Panitia dan tim editor melakukan pemindahan terhadap naskah dan format penyusunan, tetapi isi makalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab para penulis. Kami berharap dengan terbitnya prosiding ini dapat bermanfaat dan dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan khususnya di bidang Agroforestri di masa depan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakomodir mitigasi terhadap perubahan iklim.

Kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding ini, terutama kepada Rektor Universitas Mataram, Rektor Universitas Lampung, SEANAFE, INAFE dan PAFERN

Akhir kata kami ingin sampaikan permohonan maaf apabila dalam prosiding ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna.

Mataram, April 2010

Panitia dan Tim Editor



SEMINAR NASIONAL AGROFORESTRI II
PERLUASAN PROMOSI AGROFORESTRI DALAM Mendukung MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM
DI ASIA TENGGARA
(Scaling-Up Agroforestry Promotion Towards Climate Change Mitigation
In Southeast Asia (SAPSEA))
MATARAM, 27 JANUARI 2010

Pengantar Editor	i
Daftar Isi	ii
1. Vegetasi Flora Pohon Potensial untuk Mencegah Erosi Tebing Sungai Kokoq Segara pada Kawasan Hutan Bentek Kawasan Kab. Lombok Utara (Padusung dan I Gde Mertha)	1
2. Pengaruh Perlakuan Silvikultur terhadap Pertumbuhan Juvenil Tanaman Jati pada Lahan Kritis (Budiadi dan Eka Heryadi)	11
3. Peranan Usaha Lebah Madu dalam Memberikan Tambahan Pendapat (Studi Kasus pada Masyarakat Sekitar Hutan di Provinsi Lampung (Rommy Qurniati)	21
4. Potensi, Pendukung dan Penghambat Pengembangan Aren di NTB (Taslim Syah, Budhy Setiawan, Andi Chairil Ichsan)	29
5. Pemanfaatan "cash crop" untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Sekitar Hutan (Taslim Syah, Zainuri)	40
6. Kendala Biofisik Penembangan Agroforestri Berbasis Masyarakat : Studi Kasus di Pulau Lombok (Husni Idris)	46
7. Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan Melalui Pengembangan Agroindustri Berbasis Talas (Zainuri)	53
8. Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Keanekaragaman Hayati Serangga Pertanian (Tarmizi)	59

9.	Karakteristik Lanskap Agroforestri di Daerah Aliran Sungai Karang Mumus, Kalimantan Timur (Penny Pujowati, Hadi Susilo Arifin, Wahju Qamara Mugnisjah)	67
10.	Pengembangan HTI dengan Pola Agroforestri Sebagai Salah Satu Upaya Penambatan Karbon (Studi Kasus Kawasan Hutan di Kec. Sambelia, Kab. Lotim) (Endah Wahyuningsih)	81
11.	Studi Vegetasi Arboretum di Obyek Wisata Alam Joben, Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. (Febriana Tri Wulandari)	89
12.	Memasyarakatkan Agroforestri dalam Rangka Mitigasi Perubahan Iklim (Emi Roslinda)	107
13.	Prediksi Kelestarian Hutan yang dikelola Masyarakat dan Aplikasi Agroforestri di Kabupaten Lampung Barat (Christine Wulandari)	118
14.	Pendekatan Penyuluhan bagi Akselerasi Proses Adopsi dan Difusi Agroforestri pada Masyarakat Sekitar Hutan (Muktasam)	127
15.	The Role of Agroforestry Systems in Carbon Mitigation : Developing Method for Measurement of Litter Decomposition Rate (Budiadi).....	141
16.	Perilaku Ekonomi dan Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Sumberdaya Hutan di Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok (M. Siddik dan Nuning Juniarsih)	147
17.	Pengembangan Rantai Nilai untuk Meningkatkan Daya Tarik, Daya Tahan dan Daya Saing Komoditas Gaharu Lokal Provinsi NTB (M. Taufik, M. Siddik dan L. Irasakti)	161
18.	Insentif Pemungkin Aksi Kolektif Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Agroforestri : Pelajaran dari Kasus Pemanfaatan Lahan Gambut (Edwin Martin, Bondan Winarno, Indra Gumay Febryano, Andi Chairil Ihsan)	175
19.	Analisis Pengelolaan Ekowisata di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Rinjani (Hairil Anwar)	192
20.	Pola-pola Agroforestri di Sekitar Kawasan Hutan Kaki Gunung Rinjani; Kondisi Biofisik dan Pendapatan Masyarakat (Bambang Hari Kusumo, dkk)	200

67	21. Agroforestry Practice in Former Pumice-Mined land Rehabilitation : Increasing Degraded Land Quality and Supporting Climate Change Mitigation (Budi Hadi Narendra)	214
81	22. Castor Bean for Mitigating Climate Change : Opportunitie and Challenges (I Komang Damar Jaya)	224
89	23. Pemanfaatan Jarak Pagar (<i>Jatropha curcas</i> L) sebagai Komponen Agroforestri dalam Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim (Bambang B. Santoso dan Nurrachman)	234
107	24. Pertumbuhan Anakan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> King.) di Areal Reklamasi Tambang Batubara dengan Pemberian Inokulan em-4 dan top soil (Mahrus Aryadi)	246
118	25. Pemanfaatan Hasil Tanaman Tropis sebagai Bahan Baku Produk Pangan Olahan (Ansar)	258
127	26. Introduksi Tanaman Biofarmaka sebagai Salah Satu Alternatif Produk Samping Hutan Non Kayu di Areal Pengembangan Gaharu Senaru (Karwati Zawani dan L. Irasakti)	266
141	27. Keanekaragaman dan Potensi Flora di Elong-Elong Lombok Timur (I Gde Mertha)	272
147	28. Pengaruh Penambahan Fosfor Pentaoksida pada Proses Pemurnian Nira terhadap Sifat Fisik, Organoleptik dan Kimia Gula Aren (Sri Kamti)	283
161	29. Struktur dan Komposisi Hutan Rakyat di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Sitti Latifah, Indriyatno dan Irwan M.L. Aji)	291

**PERILAKU EKONOMI DAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MELESTARIKAN SUMBER DAYA HUTAN DI KAWASAN HUTAN GUNUNG
RINJANI PULAU LOMBOK
(ECONOMIC BEHAVIOUR AND COMMUNITY AWARENESS IN CONSERVING
FOREST RESOURCES IN MOUNT RINJANI AREAS OF LOMBOK ISLAND)**

Muhamad Siddik dan Nuning Juniarsih

Staf pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

ABSTRAK

Masalah ekonomi seringkali dianggap sebagai faktor penyebab kerusakan sumberdaya hutan, karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang banyak dan intens memanfaatkan sumberdaya hutan rata-rata merupakan masyarakat miskin. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat hutan, ternyata tidak diikuti oleh semakin terjaminnya kelestarian sumberdaya hutan; bahkan sebaliknya data makro kebutuhan NTB menunjukkan hutan kritis semakin luas. Permasalahan ini terkait dengan perilaku ekonomi serta orientasi nilai dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumberdaya hutan.

Untuk mengetahui masalah tersebut, telah dilakukan penelitian di Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok. Penelitian dilakukan di bagian utara, barat, timur dan selatan Gunung Rinjani. Objek penelitian adalah masyarakat hutan yang mendapat lahan garapan melalui program HKm dengan pola agroforestri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program HKm yang diberikan kepada masyarakat hutan telah membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan Gunung Rinjani, sehingga keseimbangan ekonominya meningkat di atas keseimbangan dasar. (2) Faktor-faktor yang secara konsisten dan positif mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga masyarakat hutan adalah luas penguasaan lahan HKm, keberagaman pekerjaan rumahtangga, kedekatan desa tempat tinggal dengan pusat kegiatan ekonomi, dan penguasaan lahan pertanian di luar lahan HKm. Sementara pendapatan rumahtangga dari subsidi pemerintah (BLT dan Raskin) justru menyebabkan tenaga kerja rumahtangga semakin malas dan rumahtangga semakin miskin, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif yang signifikan faktor ini terhadap waktu kerja dan pendapatan rumahtangga; (3) Orientasi nilai masyarakat dalam mengelola lahan hutan sebagian masih bersifat egosentrik dibandingkan bersifat altnustik dan biospirik, yaitu lebih mementingkan kepentingan individu dan jangka pendek dibandingkan kepentingan masyarakat sebagai kewajiban moral dan kepentingan lingkungan sebagai upaya pelestarian sumberdaya hutan. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya hutan masih kurang, meskipun ada kecenderungan semakin membaik dibandingkan sebelum memperoleh lahan HKm.

Key Word: Perilaku ekonomi, hutan kemasyarakatan, agroforestri, orientasi nilai, kesadaran pelestarian sumberdaya hutan.

PENDAHULUAN

Deforestasi atau semakin menurunnya luas areal dan kualitas sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan. Sebagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat, terutama masyarakat di kawasan hutan, seringkali dituding sebagai faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Hal ini dapat dipahami, karena kelompok masyarakat inilah yang paling intens memanfaatkan sumberdaya hutan selama ini, baik sebagai sumber energi maupun sebagai wahana untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial budaya.

Menurut Runyan dalam ITTO (2001), sekitar 60 juta orang Indonesia hidupnya pada hutan dan kebanyakan mereka termasuk dalam golongan miskin (2000) dan BPS (2000) dalam Departemen Kehutanan (2006) juga melaporkan bahwa 48,8 juta penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan, dan sekitar 10% diantaranya tergolong dalam klasifikasi miskin. Sekitar 6 juta jiwa dari jumlah tersebut bermata pencaharian langsung dari hutan. Sementara itu, tim survei BPS (2000) mencatat lebih kurang 600.000 jiwa penduduk bermukim di sekitar kawasan hutan Rinjani yang tersebar di 90 desa-desa di tiga kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sebagian terbesar dari mereka menggantungkan hidupnya pada hutan dan tergolong masyarakat kurang mampu (miskin).

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan rata-rata masih miskin, maka permasalahan yang sering dianggap sebagai penyebab masyarakat mengeksploitasi sumberdaya hutan adalah masalah ekonomi. Di Kabupaten Tenggara Barat, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan (terutama di desa-desa sekitar kawasan Hutan Gunung Rinjani) paling miskin dibandingkan masyarakat di kawasan lainnya. Ini terlihat dari jumlah masyarakat yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan raskin (beras untuk masyarakat miskin) yang tinggi (lihat BPS: Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur dalam Angka 2005). Hal ini memperkuat dugaan bahwa kerusakan sumberdaya hutan yang telah menyebabkan bencana ekologis, seperti; banjir, tanah longsor, kekeringan, tanah kritis dan lain-lain di Pulau Lombok akhir-akhir ini adalah sebagai akibat tekanan masalah ekonomi masyarakat penduduk.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah dan parapihak yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di hutan, khususnya di kawasan hutan Gunung Rinjani, telah banyak diimplementasikan. Salah satunya adalah hutan kemasyarakatan (HKm) yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1998 di kawasan hutan (Amiruddin, 2005; Faperta Unram, 2007). Tapi bersamaan dengan itu, HKm tersebut, justru dilaporkan kerusakan sumberdaya hutan semakin meningkat. Sebagai gambaran, pada awal pelaksanaan HKm tahun 1998, luas lahan hutan yang rusak adalah sekitar 78.000 Ha; kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 159.000 Ha atau 77,1% (13.500 Ha/tahun (Dishut NTB, 2005). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan tersebut belum dapat memotivasi masyarakat untuk ikut melestarikan sumberdaya hutan bahkan cenderung mengeksploitasinya.

Secara ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan, memang memungkinkan masyarakat melestarikan sumberdaya hutan.

mengikuti anggapan teori ekonomi rumahtangga (Mellor, 1963; Hart, 1978; Halide, 1981); hal tersebut hanya mungkin dan akan berlangsung secara konsisten, bilamana pendapatan masyarakat sudah meningkat sampai di atas garis kemiskinan (*subsistence level*); atau dengan kata lain keseimbangan ekonomi masyarakat sudah berada di atas tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium*). Tapi bila keseimbangan ekonominya masih di bawah keseimbangan dasar, maka masyarakat akan berusaha mencari sumber pencaharian lain, meskipun dengan upah yang lebih rendah atau resiko yang tinggi, termasuk kemungkinan mengeksploitasi sumberdaya hutan

Dari sudut pandang lain, kerusakan sumberdaya hutan juga dapat disebabkan oleh perilaku ekonomi masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Hal ini juga sangat tergantung pada pengetahuan, kesempatan, karakter individu, orientasi nilai dan kesadaran masyarakat itu sendiri, sehingga dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap sumberdaya hutan, justru mempermudah mereka mengeksploitasi sumberdaya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pola perilaku ekonomi rumahtangga masyarakat hutan tersebut; (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) menggambarkan tingkat keseimbangan ekonomi yang dicapai oleh masyarakat hutan; dan (4) mendeskripsikan orientasi nilai dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumberdaya hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang didesain dalam bentuk penelitian survei; diarahkan untuk mendeskripsikan perilaku ekonomi dan kesadaran masyarakat di kawasan hutan Gunung Rinjani. Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu kawasan yang dinilai kritis yang perlu segera mendapat penanganan, dilihat dari kondisi fisik kawasan dan kondisi masyarakat yang terdapat di bagian utara, selatan, barat dan timur Gunung Rinjani. Di setiap kawasan dipilih satu desa sampel secara purposive, yaitu desa yang disinyalir memiliki kawasan hutan paling kritis dan masyarakatnya paling miskin, yaitu: Desa Senaru dibagian utara, Desa Setiling di bagian selatan, Desa Sesaot di bagian barat dan Desa Perigi dibagian timur Gunung Rinjani.

Objek penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam program hutan kemasyarakatan. Penetapan dan pemilihannya dilakukan secara *random sampling*, masing-masing desa sebanyak 30 rumahtangga petani, sehingga jumlah responden seluruhnya 120 orang atau 120 rumahtangga. Untuk mendapatkan informasi yang bersifat umum, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci. Di setiap desa ditetapkan 5 orang, terdiri atas Kepala Desa atau yang mewakilinya; tokoh masyarakat atau tokoh adat; pimpinan lembaga pengelola HKM dan Petugas Dinas Kehutanan setempat; dan 1 orang yang mewakili petani

Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengkombinasikan beberapa teknik penelitian secara bersama-sama, yakni: pengamatan lapang (*field observation*), dokumentasi (*documentation*), wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan objek penelitian; wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan key informan, studi pustaka (*review documentation*), survei virtual melalui internet; dan dengan melakukan diskusi terfokus secara kelompok (*Focussed Group Discussion = FGD*):

Analisis data diurutkan berdasarkan urutan tujuan penelitian: Untuk menganalisis perilaku ekonomi rumahtangga dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif; untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga dianalisis dengan menggunakan regresi berganda; dan untuk menganalisis tingkat keseimbangan ekonomi rumahtangga dianalisis dengan menggunakan bantuan grafik.

HASIL PENELITIAN

Perilaku Ekonomi Rumahtangga Masyarakat Hutan

Perilaku ekonomi rumahtangga ditelaah dari tiga aspek, yaitu dari alokasi waktu, struktur pendapatan dan struktur pengeluaran. Ketiga aspek ini mempunyai kaitan satu dengan lainnya. Pengeluaran rumahtangga biasanya ditentukan oleh pendapatannya; pendapatan rumahtangga ditentukan oleh curahan waktu kerjanya; dan curahaha waktu kerja ditentukan oleh pengeluarannya; dan seterusnya. Berikut ini merupakan uraian tentang perilaku rumahtangga pada tiga aspek dimaksud.

Pola Alokasi Waktu Kerja

Alokasi waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah jam kerja yang dicurahkan oleh anggota rumahtangga untuk tujuan produktif. Bagi masyarakat petani, termasuk masyarakat hutan, pola alokasi waktu kerjanya sangat ditentukan oleh musim. Pada musim hujan rata-rata masyarakat tani sibuk bekerja pada lahan sawah, baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Bekerja pada lahan hutan banyak dilakukan pada musim kemarau sampai awal musim hujan. Pekerjaan yang terus menerus dilakukan sepanjang tahun adalah pemeliharaan ternak, usaha dagang dalam bentuk kios dan pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan swasta, tapi jumlah masyarakat hutan yang bekerja pada dua jenis pekerjaan terakhir sangat terbatas. Pekerjaan yang dipandang mengisi waktu kerja rumahtangga sepanjang tahun adalah pekerjaan di lahan HKm.

Tabel 1. Alokasi Waktu Kerja Rumahtangga Masyarakat Hutan di Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjani Pulau Lombok NTB, Tahun 2009 (dalam jam/th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Selatan	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Rata-Rata Waktu Kerja	
					Jam/Th	%
1. Sektor Pertanian						
• Usahatani Lhn HKm	646	1.248	1.914	659	1.117	73,08
• Usahatani luar HKm	413	804	248	1.104	642	26,92
• Usaha Ternak	21	45	-	281	87	3,99
• Usaha Ikan	-	-	-	-	-	0,00
• Buruh Tani	259	199	137	259	213	8,92
Total 1	1.339	2.297	2.300	2.303	2.060	73,08
2. Luar Sektor Pertanian						
• Usaha Dagang	152	108	505	4	192	7,38
• Usaha Jasa	408	119	564	258	337	13,12
• Industri Kerajinan	95	44	-	-	35	1,36
• Karyawan/Pegawai	157	-	67	48	68	2,67
• Buruh luar Pertanian	115	88	278	25	127	4,94
Total 2	927	358	1.414	336	759	26,92
Total 1 + 2	2.267	2.655	3.714	2.638	2.819	100,00

Secara keseluruhan, rata-rata waktu kerja rumahtangga masyarakat hutan dari berbagai jenis pekerjaan produktif pertahun adalah sebanyak 2.819 jam, 73,08% dari waktu kerja tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian. Sisanya 26,92% (759 jam) dicurahkan untuk kegiatan di luar sektor pertanian, terutama pada usaha jasa, usaha dagang dan sebagai buruh kasar di luar pertanian. (lihat Tabel 1).

Sumbangan lahan HKm dalam memberikan kesempatan kerja pada masyarakat hutan, rata-rata paling banyak dibandingkan jenis pekerjaan lain, yaitu sebanyak 39,63% atau rata-rata 1.117 jam/tahun. Tapi bila diamati perlokasi, tampaknya masyarakat hutan di kawasan timur Gunung Rinjani memiliki waktu kerja pada lahan HKm lebih rendah dibandingkan pada kegiatan usahatani di luar HKm. Hal ini terkait dengan jenis komoditi yang diusahakan di lahan HKm dominan tanaman pangan semusim, seperti padi dan palawija yang dilakukan secara ekstensif sehingga tidak banyak menyerap waktu kerja; sementara di luar lahan HKm, dalam 3 tahun terakhir rata-rata masyarakat hutan di kawasan itu, mengusahakan tanaman tembakau secara intensif sehingga waktu kerja mereka banyak terserap pada kegiatan tersebut.

Pola dan Struktur Pendapatan Rumahtangga

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota rumahtangga, maka rumahtangga masyarakat hutan akan berusaha memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari hasil kerja maupun yang berasal dari luar hasil kerja. Pendapatan yang berasal dari hasil kerja biasanya disebut *labor income*. Sedang pendapatan yang berasal dari luar hasil kerja disebut *non labor income*. Pendapatan rumahtangga yang berasal dari luar hasil kerja dapat berasal dari *transfer income*, seperti dari pemberian, subsidi, kiriman keluarga dari luar daerah/negeri; dan juga dari *property income*, seperti dari penyewaan asset (tanah, rumah, ternak dll) termasuk dari bunga modal (Shand, 1986).

Setelah dianalisis secara keseluruhan, pendapatan rumahtangga dari hasil kerja maupun dari luar hasil kerja pada tahun 2008/2009 rata-rata berjumlah Rp. 9.951.000,-. Pendapatan dari hasil kerja yang berasal dari sektor pertanian berjumlah Rp. 5.932.000 (59,61%) dari luar sektor pertanian berjumlah Rp. 3.244.000 (32,60%). Sedangkan yang berasal dari luar hasil kerja yang sebagian besar dari subsidi pemerintah (BLT dan Raskin) rata-rata berjumlah Rp. 775.000 (7,90%) pertahun (lihat Tabel 2).

Memperhatikan proporsi sumbangan masing-masing kegiatan terhadap pendapatan rumahtangga pada Tabel 2 secara umum tampak bahwa kegiatan pada sektor pertanian di luar lahan HKm masih memberikan sumbangan pendapatan lebih besar (25,43%) dibandingkan di lahan hutan (24,85%), meskipun lahan HKm yang dikuasai lebih luas dan waktu kerja yang dicurahkan lebih banyak daripada lahan pertanian di luar lahan HKm. Ini disebabkan karena tanaman yang ada di sebagian besar lahan HKm belum semuanya berproduksi atau berproduksi maksimal, seperti di lahan HKm Senaru sebagian besar tanaman yang ada belum berproduksi termasuk tanaman gaharu yang menjadi tanaman utamanya. Begitu juga di HKm Desa Setiling, tanaman coklat dan kopi baru mulai berproduksi pada tahun 2009, sehingga tingkat produksinya masih rendah. Lebih-lebih di HKm Desa Perigi, lahannya sebagian besar tidak banyak dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan buah-buahan. Berbeda dengan HKm di Desa Sesaot; karena pembukaan lahan HKm di desa ini paling dulu (sejak tahun 1995-1998), maka sebagian besar dari tanaman yang diusahakan sudah berproduksi secara maksimal. Karena itu pendapatan rumahtangga dari lahan HKm di desa ini jauh lebih besar daripada desa-desa lainnya.

Sumber penghasilan masyarakat hutan yang cukup berarti dari sektor pertanian adalah dari kegiatan berburuh tani. Kegiatan ini memberikan sumbangan sebesar 0,57% terhadap pendapatan rumahtangga atau sebesar Rp. 634.000 pertahun. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan berburuh tani sudah menjadi pencaharian bagi masyarakat hutan. Kegiatan ini tidak hanya terjadi di luar kawasan hutan, tapi juga di dalam kawasan hutan. Pada saat FGD diinformasikan bahwa tolong menolong dengan tenaga dalam kegiatan usahatani yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat hutan sejak dulu sudah semakin menghilang di tengah

masyarakat. Semua sumbangan tenaga akan diperhitungkan dengan sejumlah uang tertentu, mereka sudah sepakati terlebih dahulu. Kegiatan tolong menolong hanya berlaku untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan, seperti pesta acara adat dan sejenisnya. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kemungkinan memperoleh penghasilan semuanya diperhitungkan dengan uang, sehingga masyarakat terkesan semakin komersial. Di sini maka jelas bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi dan sumber penghasilan masyarakat hutan.

Tabel 2. Struktur Pendapatan Rumahtangga Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Kawasan Gunung Rinjani Pulau Lombok NTB,2009 (dalam Rp.000/th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Kawasan Selatan	Rata-Rata Pendapatan Rp.000/th
1. Sektor Pertanian					
• Usahatani di HKM	1.593	5.455	817	2.027	2.473
• Usahatani luar HKM	1.064	1.478	4.040	3.538	2.530
• Usaha Ternak	47	-	848	283	295
• Usaha Ikan	-	-	-	-	-
• Buruh Tani	536	273	912	816	634
Total 1	2.746	7.206	6.617	6.664	5.932
2. Luar Sektor Pertanian					
• Usaha Dagang	618	1.540	43	900	775
• Usaha Jasa	934	1.950	1.008	569	1.115
• Industri Kerajinan	370	-	-	103	118
• Karyawan/Pegawai	1.312	960	600	-	718
• Buruh luar Pertanian	607	883	167	410	517
Total 2	3.841	5.333	1.818	1.983	3.244
3. Dari Luar Curahan TK					
• Raskin	457	91	130	137	204
• BLT	961	46	340	508	464
• Kiriman TKI	203	-	83	98	96
• Lainnya	-	-	40	7	12
Total 3	1.621	137	594	749	775
Total Keseluruhan	8.208	12.676	9.028	9.397	9.951

Sementara di luar sektor pertanian, sumber penghasilan rumahtangga paling banyak adalah dari usaha jasa, memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga lebih dari 11,21%. Selanjutnya adalah usaha dagang 7,79%, sebagai pegawai atau karyawan 7,22% dan sebagai buruh kasar 5,19%. Sedangkan usaha kerajinan dan industri rumahtangga hanya menyumbangkan pendapatan sebesar 1,19% terhadap pendapatan rumahtangga. Rendahnya sumbangan sektor industri dan kerajinan rumahtangga ini menunjukkan bahwa masyarakat hutan belum mampu memanfaatkan potensi dan peluang ekonomi yang mereka miliki. Mereka baru mampu menjual jasa sebagai porter, pengojek, tukang, supir angkutan dan sebagai buruh kasar. Kegiatan inipun mulai berkembang setelah kawasan hutan banyak dijadikan sebagai objek pariwisata, sehingga sangat tergantung pada kondisi global. Sementara usaha dagang yang dilakukan oleh masyarakat hutan masih terbatas pada usaha kios untuk melayani masyarakat setempat. Meskipun ini terkesan sebagai pekerjaan sampingan dengan skala usaha

dan omzet terbatas, tapi karena dilakukan di rumah dan secara terus menerus, makaumbangannya terhadap pendapatan rumahtangga cukup besar, yaitu sebesar 7,79%.

Di luar hasil kerja, sumber pendapatan masyarakat hutan selain dari subsidi pemerintah boleh dikatakan tidak ada atau sangat terbatas. Rumahtangga yang memiliki anggota keluarga bekerja di luar negeri saja yang memperoleh pendapatan dari luar curahan tenaga kerja. Selain itu adalah dari subsidi pemerintah melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan melalui program Raskin (Beras Untuk Orang Miskin). Kontribusi dari pendapatan yang berasal dari luar curahan tenaga kerja adalah sebesar 7,79% dari total pendapatan rumahtangga atau sebesar Rp. 775.000 pertahun.

Struktur Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rutin rumahtangga ditentukan oleh pendapatan rumahtangga dan perilaku konsumtif dari rumahtangga yang bersangkutan. Pengeluaran rumahtangga secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumtif atau habis dan pengeluaran yang bersifat produktif atau tidak habis dan berjangka panjang. Pengeluaran yang bersifat produktif umumnya dikeluarkan apabila sudah terpenuhi pengeluaran yang bersifat konsumtif dan rutin. Pada Tabel 3 hanya disajikan pengeluaran konsumtif rumahtangga yang bersifat rutin.

Tabel 3. Struktur Pengeluaran Konsumtif Rumahtangga Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Gunung Rinjai Pulau Lombok, Tahun 2008/2009 (dalam Rp.000/th)

Jenis Pekerjaan	Kawasan Utara	Kawasan Selatan	Kawasan Barat	Kawasan Timur	Rata-Rata Pengeluaran	
					Rp.000/Th	%
1. Makanan/Minuman						
• Beras+KH lain	1.710	2.152	2.719	2.062	2.161	30,16
• Lauk Pauk	1.498	1.381	1.929	1.387	1.549	21,62
• Buah-buahan	135	103	112	110	115	1,60
• Kopi/Gula/Teh	275	341	340	376	333	4,65
• Mak. Suplemen	214	285	99	251	212	2,96
• Min.Suplemen	12	187	49	123	93	1,29
• Rokok, sirih dll	417	405	444	303	392	5,47
Total 1	4.259	4.853	5.692	4.610	4.854	67,75
2. Luar Makan/Minuman						
• Pakaian	300	366	562	416	411	5,74
• Pendidikan	127	1.079	341	816	591	8,25
• Kesehatan	100	170	152	160	145	2,03
• Rumah/Penerangan	290	224	285	302	275	3,84
• Bahan Bakar	239	188	253	249	232	3,24
• Rekreasi/Transportasi	242	299	423	286	313	4,36
• Komunikasi	449	166	158	77	213	2,97
• Partisipasi Sosial	175	99	159	90	131	1,83
Total 2	1.922	2.591	2.333	2.396	2.310	32,25
Total 1 + 2	6.181	7.444	8.025	7.006	7.164	100,00

Bila data pengeluaran rutin rumahtangga pada Tabel 3 dibandingkan dengan data pendapatan pada Tabel 2 maka tampak bahwa pendapatan rumahtangga masih lebih besar daripada pengeluarannya. Ini artinya masih tersisa pendapatan rumahtangga yang dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan rumahtangga yang bersifat tidak rutin atau bersifat

produktif dan berjangka panjang. Sisa pendapatan rumahtangga tersebut adalah sebesar Rp. 9.951.000 - Rp. 7.164.000) = Rp. 2.787.000,- sehingga dari sisa pendapatan ini sebagian masyarakat hutan yang menguasai lahan HKm sudah mampu minimal mempertahankan kondisi ekonomi rumahtangganya bahkan meningkatkannya, meskipun tanpa subsidi dari pemerintah.

Pada Tabel 3 juga ditunjukkan bahwa meskipun struktur pengeluaran rumahtangga untuk bahan makanan dan minuman masih lebih besar dari pengeluaran di luar makanan dan minuman, tapi proporsi pengeluaran untuk bahan makanan dan minuman masih di bawah angka 75%, yaitu sebesar 67,75%. Ini artinya masyarakat hutan sudah berada di atas garis subsistensi atau garis kemiskinan (*subsistence level*) karena sudah mampu mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran di luar makanan dan minuman sebesar 32,25%. Akan tetapi bila berpatokan pada standard PBB \$ 1 dollar AS perhari perorang, maka pendapatan rumahtangga ini masih di bawah garis kemiskinan. Karena bila harga 1 dollar AS sebesar Rp, 10.000,- dengan anggota rumahtangga rata-rata sebanyak 3,4 orang, maka garis kemiskinan berdasarkan pendekatan PBB tersebut berada pada pendapatan sebesar Rp. 12.240.000,- per tahun. Jika dibandingkan dengan pendapatan rumahtangga yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar Rp. 9.951.000, maka masyarakat hutan masih tergolong miskin dengan tingkat pencapaian sebesar 81,30% dari standard garis kemiskinan PBB tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi Rumahtangga Masyarakat Hutan

Hasil analisis regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap perilaku ekonomi rumahtangga, baik terhadap waktu kerja, pendapatan atau pengeluaran rumahtangga. Variabel-variabel tersebut adalah yang terkait dengan karakteristik kepala rumahtangga, yaitu umur (X_5) dan tingkat pendidikan (X_6) kepala rumahtangga. Ini artinya bagi rumahtangga yang memiliki kepala rumahtangga berumur muda maupun yang sudah tua, berpendidikan atau tidak berpendidikan perilaku ekonomi rumahtangganya tidak menunjukkan perbedaan secara nyata atau signifikan.

Faktor yang secara nyata dan konsisten berpengaruh terhadap perilaku ekonomi rumahtangga baik terhadap waktu kerja, pendapatan dan pengeluaran rumahtangga adalah luas penguasaan lahan HKm (X_1), keragaman pekerjaan rumahtangga (X_7) dan lokasi serta keterisoliran desa (X_8). Bagi rumahtangga yang menguasai lahan hutan (HKm) lebih luas, curahan waktu kerja, pendapatan dari hasil kerja dan pengeluaran rutin rumahtangganya lebih banyak dan lebih besar daripada rumahtangga yang menguasai lahan HKm lebih sempit. Begitu juga semakin beragam pekerjaan rumahtangga, maka alokasi waktu kerja, pendapatan dan pengeluaran rumahtangganya juga cenderung semakin banyak dan semakin besar. Demikian juga semakin dekat desa tempat tinggal masyarakat hutan dengan pusat perekonomian (Kota Mataram) semakin banyak waktu kerja yang dicurahkan dan semakin besar pendapatan dan pengeluaran rumahtangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa luas lahan HKm, keragaman pekerjaan rumahtangga dan lokasi desa tempat tinggal masyarakat hutan dari pusat kegiatan ekonomi dapat menjadi indikator kesejahteraan ekonomi rumahtangga masyarakat hutan.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumahtangga adalah adanya penguasaan lahan di luar lahan hutan (X_2). Variabel ini meskipun tidak berpengaruh nyata terhadap waktu kerja, tapi berpengaruh nyata terhadap pendapatan dari hasil kerja dan terhadap pengeluaran konsumtif rumahtangga. Kondisi yang relatif sama juga ditunjukkan oleh faktor jumlah anggota rumahtangga (X_3), tidak berpengaruh terhadap waktu kerja, tapi berpengaruh positif dan sangat nyata terhadap pengeluaran konsumtif rumahtangga. Faktor yang hanya berpengaruh positif terhadap waktu kerja adalah faktor jumlah tenaga kerja rumahtangga

tapi tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan maupun pengeluaran rumahtangga. Ada dengan faktor pendapatan rumahtangga dari luar hasil kerja yang dominan berasal dari pemerintah berupa Raskin dan BLT (X_9). Faktor ini menyebabkan tenaga kerja rumahtangga semakin malas bekerja dan mengindikasikan kemiskinan, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif faktor ini terhadap waktu kerja, terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil bahkan ada kecenderungannya terhadap pengeluaran konsumtifnya yang bersifat rutin.

4. Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Kerja, Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Masyarakat Hutank, 2009.

Variabel Bebas (Independent variable)	Koefisien Regresi		
	Waktu Kerja (TW)	Pendapatan RT (TY)	Pengeluaran RT (TP)
konstante (a)	2.255,381	1.213,240	3.154,665
Lahan HKm (X_1)	7,075***	43,245***	10,114**
Lahan di Luar HKm (X_2)	1,219	40,797***	21,397***
Anggota RT (X_3)	-29,914	970,338*	970,956***
Tenaga Kerja (X_4)	715,878***	145,178	-99,018
Kepala RT (X_5)	24,602	886,185	259,896
Kepala RT (X_6)	-11,163	48,289	-3,069
Pekerjaan RT (X_7)	650,674***	4.367,565***	2.315,987***
Desa (X_8)	-416,774***	-1.734,348***	-988,911***
Pendapatan dari Luar TK (X_9)	-0,416**	-1,914*	-0,205

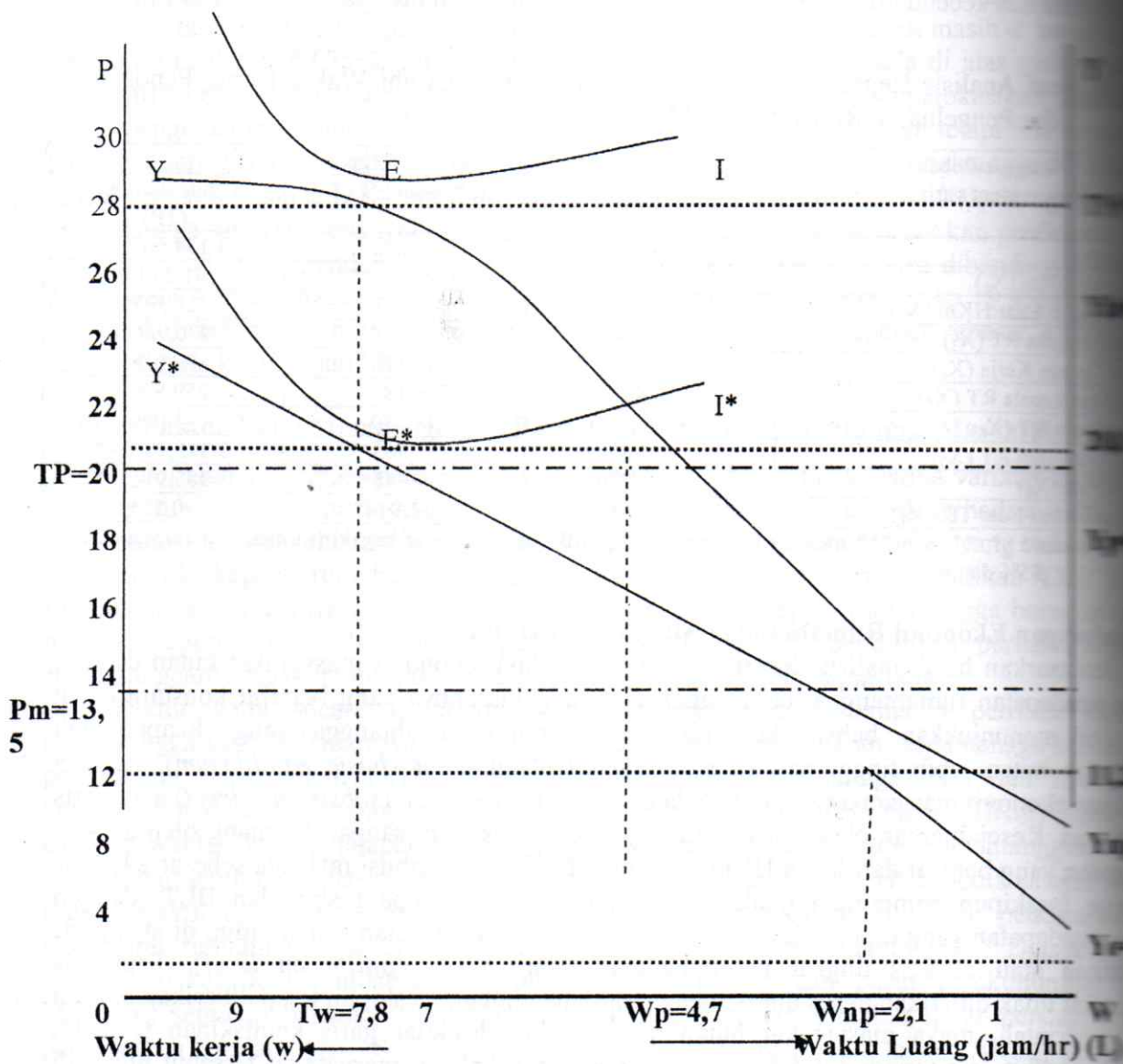
Legenda: tanda *, **, dan *** menunjukkan tingkat signifikansi pada taraf keyakinan atau kepercayaan 90%, 95% dan 99%.

Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Masyarakat Hutan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang perilaku ekonomi masyarakat hutan di atas, pendapatan rumahtangga lebih tinggi dari pengeluarannya yang bersifat konsumtif dan ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi rumahtangga yang dicapai oleh masyarakat hutan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium*). Artinya rumahtangga ekonomi masyarakat sudah berada di atas garis subsisten (*subsistence level*) atau garis kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi rumahtangga masyarakat ini sangat ditunjang oleh adanya pendapatan yang berasal dari lahan HKm yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 24,85%. Rumahtangga meskipun pemerintah tidak memberikan subsidi berupa raskin dan BLT, dengan pendapatan yang diperoleh dari lahan HKm, masyarakat hutan sudah hidup di atas garis kemiskinan atau di atas tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium level*). Tapi bila masyarakat tidak diberikan akses untuk menguasai lahan hutan, meskipun tetap diberikan subsidi pemerintah, maka masyarakat hutan masih hidup disekitar garis kemiskinan tersebut, rumahtangga sedikit saja terjadi gejolak ekonomi akan menyebabkan masyarakat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa tingkat keseimbangan dasar masyarakat hutan berada di bawah tingkat konsumsi sebesar Rp. 20 ribu/hari., sementara penghasilannya bila tidak ada lahan HKm dan subsidi pemerintah adalah sebesar Rp. 18,6 ribu/hari (Rp. 20,8 ribu dikurangi 2,2 ribu); berarti masyarakat hutan masih hidup di bawah garis kemiskinan atau di bawah tingkat keseimbangan dasar. Dengan adanya subsidi dari pemerintah berupa raskin dan BLT rata-rata sebesar Rp. 2,2 ribu/hari, maka pendapatannya meningkat menjadi Rp. 20,8 ribu/hari, sehingga pendapatannya sedikit lebih tinggi dari nilai kebutuhan dasarnya. Selanjutnya dengan adanya lahan HKm yang memberikan pendapatan pada masyarakat hutan rata-rata sebesar Rp. 6,9

ribu/hari, maka pendapatan rumahtangga meningkat menjadi Rp. 27.7 ribu/hari atau sekitar 7,7 ribu lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dasarnya. Ini berarti kebijakan memberikan akses pada masyarakat untuk mengelola lahan hutan telah dapat mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hutan.



Gambar 2. Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Masyarakat Hutan

Keterangan : Y* garis anggaran atau pengeluaran konsumtif rumahtangga pada tingkat keseimbangan dasar, Y = kurve kemungkinan pendapatan rumahtangga dari hasil kerja; I* kurve indiferen pada tingkat keseimbangan dasar dan E* = titik keseimbangan dasar rumahtangga, I kurve indiferen pada tingkat kesimbangan aktual, E = titik kesimbangan aktual yang dicapai oleh masyarakat hutan.

Orientasi Nilai dan Kesadaran Masyarakat Akan Pelestarian Sumberdaya Hutan

Untuk mengetahui orientasi nilai dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumberdaya hutan ditelaah dari tanggapannya terhadap pernyataan-pernyataan pada Tabel 5. Tanggapan masyarakat tersebut bersifat subjektif, tapi setidaknya-tidaknya mencerminkan apa yang mereka rasakan dan inginkan. Tanggapan yang perlu dicermati adalah yang kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, karena hal itu menunjukkan bahwa orientasi nilai dan kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya hutan masih kurang.

Tabel 5. Orientasi Nilai dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Sumberdaya Hutan di Kawasan Hutan Gunung Rinjani, tahun 2009

Daftar pernyataan	% Tanggapan Masyarakat				
	SS	S	KS	TS	STS
1. Kawasan Hutan Gunung Rinjani (KHGR) harus tetap dijadikan kawasan hutan dibandingkan jadi kawasan pertanian (HKm)	9	16	30	45	-
2. Pembukaan HKm hanya dapat dilakukan bila tidak merusak lingkungan hutan	7	93	-	1	-
3. Lahan kosong dalam hutan harus ditanami pohon pelindung meskipun tidak memberikan keuntungan ekonomi	8	35	42	17	-
4. Pengambilan kayu bakar di hutan hanya boleh bila kayu itu sudah mati dan tidak merusak lingkungan	3	86	1	7	3
5. Penebangan kayu hutan tidak boleh dilakukan meskipun untuk memenuhi kebutuhan sendiri	11	50	34	5	-
6. Pencurian kayu hutan harus diberikan hukuman yang berat pada para pelakunya.	29	61	8	3	-
7. Penduduk desa yang melakukan pencurian kayu hutan harus dikeluarkan dari kampung	8	16	48	24	5
8. Pembakaran apapun ditengah hutan harus dilarang dan diberikan sanksi	18	73	8	2	-
9. Pengembalaan ternak yang merusak lingkungan hutan harus dilarang dan dikenakan sanksi	1	5	10	10	74
10. Pembangunan rumah dan kandang permanen ditengah hutan tidak boleh dilakukan	9	86	3	2	-
11. Pembuangan limbah RT dan unsur-2 berbaya ke dalam kawasan hutan tidak boleh dilakukan	10	89	1	-	-
12. Setiap orang harus berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan meskipun bukan dilahan HKmnya	10	74	10	6	-
13. Lahan HKm yang mempunyai kemiringan tajam tidak boleh diolah meskipun subur	1	71	22	7	-
14. Lahan HKm yang tidak dikelola (diusahakan) dengan baik supaya diserahkan kepada pihak lain	19	72	8	1	-
15. Lahan HKm harus mengutamakan tanaman kayu-kayuan atau paling tidak tanaman tahunan daripada tanaman musiman	5	59	28	8	-
16. Petani HKm harus/wajib mengikuti ketentuan-2 dari pemerintah dalam pengelolaan lahan hutan	3	94	2	-	-
17. Pembersihan dan pengolahan lahan HKm tidak boleh dilakukan dengan cara pembakaran	9	84	7	-	-
18. Pengendalian hama penyakit sebaiknya menggunakan pestisida hayati atau kearifan lokal yang ada	4	88	7	1	-

19. Pemupukan tanaman sebaiknya menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang	89	5	5	-
20. Penyiangan tanaman pertanian perlu dilakukan, tapi tidak boleh dengan cara dibakar	4	91	5	-
21. Lahan HKM yang terbuka harus ditanami dengan tanaman penghijauan atau pelindung/tahunan.	6	87	7	-
22. Proporsi tanaman hutan (kayu-kayuan) dengan tanaman MPTS di lahan HKM harus lebih banyak	4	4	6	22
23. Lahan HKM tidak boleh dipindahtangankan tanpa sepengetahuan pemerintah/pengelola	23	76	-	1
24. Lahan HKM harus dikuasai oleh masyarakat desa setempat.	35	64	-	-

Keterangan: SS= sangat setuju; S=setuju; KS=kurang setuju; TS=tdk setuju; STS=sangat tdk setuju

Dari 24 pernyataan pada Tabel 5 di atas, sebagian besar ditanggapi positif oleh sebagian besar masyarakat hutan; namun demikian dengan adanya masyarakat yang kurang setuju, sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan upaya-upaya pelestarian hutan; menunjukkan perlu adanya pembinaan kepada masyarakat tersebut, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelestarian tersebut meskipun dilakukan oleh satu atau dua orang kalau dibiarkan akan cepat menyebar dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Pernyataan yang ditanggapi positif oleh seluruh responden dengan sangat setuju dan setuju, yaitu pernyataan yang menyatakan lahan HKM harus dikuasai oleh masyarakat desa setempat.

Setelah dikonfirmasi dengan tokoh-tokoh masyarakat pada saat dilakukan FGD, sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut tidak berbeda jauh dengan norma dan aturan yang terdapat dalam awig-awig. Namun karena awig-awig yang dibuat sudah cukup lama dan kurang tersosialisasi pada masyarakat, terutama pada penggarap baru, maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan pengelolaan lahan hutan. Terlebih-lebih pada lahan HKM yang pengawasannya kurang intensif, maka banyak terjadi pelanggaran dalam penggarapan lahan hutan yang mengancam pelestarian sumberdaya hutan. Karena itu hal yang diperlukan dalam upaya pelestarian sumberdaya hutan ke depan adalah sosialisasi awig-awig disertai dengan pengawasan pelaksanaannya yang diikuti oleh penyuluhan penyadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya hutan, agar orientasi nilai masyarakat berubah dari eksploitasi ke konservasi sumberdaya hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- (1) Kebijakan pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan melalui program hutan kemasyarakatan (HKM) dengan pola agroforestri telah membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani. Dengan adanya lahan HKM, pola dan alokasi waktu kerja masyarakat berjalan sepanjang tahun; pendapatannya masyarakat berada di atas tingkat kebutuhan atau keseimbangan dasar. Rata-rata nilai kebutuhan dasarnya Rp. 20.000 perhari; sementara pendapatan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp. 27.800 perhari. Sekitar 24,45% atau sebesar Rp. 6.900 pendapatan disumbangkan oleh lahan HKM.
- (2) Keberadaan lahan HKM telah meningkatkan status ekonomi rumah tangga masyarakat hutan dari sekitar tingkat keseimbangan dasar (*basic equilibrium level*) yang setara dengan garis

kemiskinan ke tingkat keseimbangan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih sejahtera (*higher equilibrium level*).

3) Faktor-faktor yang secara konsisten dan positif mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga masyarakat hutan adalah luas penguasaan lahan HKm, keberagaman pekerjaan rumahtangga, kedekatan desa tempat tinggal dengan pusat kegiatan ekonomi dan penguasaan lahan pertanian di luar lahan HKm. Sementara pendapatan rumahtangga dari subsidi pemerintah (BLT dan Raskin) justru menyebabkan tenaga kerja rumahtangga semakin malas dan rumahtangga semakin miskin, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif yang signifikan faktor ini terhadap waktu kerja dan pendapatan rumahtangga.

4) Orientasi nilai masyarakat dalam mengelola lahan hutan cenderung bersifat egosentrik dibandingkan bersifat altnustik dan biospirik, yaitu lebih mementingkan kepentingan individu dan jangka pendek dibandingkan kepentingan masyarakat sebagai kewajiban moral dan kepentingan lingkungan sebagai upaya pelestarian sumberdaya hutan. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya hutan masih kurang, meskipun ada kecenderungan semakin membaik dibandingkan sebelum memperoleh lahan HKm.

Saran

1) Untuk mengatasi lahan hutan yang kritis atau gundul sekaligus mengentaskan kemiskinan di NTB, dapat diterapkan program hutan kemasyarakatan dengan memberikan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan yang ketat agar program HKm itu tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan secara bersama-sama. Dan terhadap program HKm yang sudah berjalan perlu dievaluasi terutama pada lokasi-lokasi yang kurang berhasil seperti di sebagian timur Kawasan Gunung Rinjani (Desa Perigi dan sekitarnya), supaya permasalahan yang terjadi bisa cepat diatasi.

2) Subsidi pemerintah kepada masyarakat hutan berupa raskin dan BLT sebaiknya ditinjau kembali dan diarahkan pada perbaikan dan pengadaan infrastruktur ekonomi, karena ternyata program BLT dan Raskin tersebut justru menyebabkan masyarakat semakin malas dan semakin miskin; dan menimbulkan ijon gaya baru dalam masyarakat.

3) Penelitian ini perlu ditindaklanjuti untuk merumuskan program hutan kemasyarakatan dengan pola agroindustri yang dapat menjamin peningkatan pendapatan masyarakat di atas tingkat keseimbangan dasar sekaligus pelestarian sumberdaya hutan secara bersama-sama dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

Miruddin, 2005. Evaluasi Tingkat Ketertutupan Lahan dan Dampak Sosial Ekonomi Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok NTB. *Jurnal Agroteksos* Vol.15.No.3.: p 223-233.

Departemen Kehutanan RI, 2006. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025. Pusat Rencana dan Statistik Badan Planologi Kehutanan. Jakarta. 77p

- Faperta Unram, 2007. Evaluasi Lahan, Tanaman, Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pada Proyek Pengembangan Gaharu di Kawasan Hutan Pendidikan Senaru Kabupaten Lombok Barat. Fakultas Pertanian Unram. Mataram.
- Gawi, Jamal M, 1999. Konsep Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. (Beberapa Catatan Hasil Seminar dan Lokakarya Pengembangan SDM Hutan Kemasyarakatan, Bogor 7-9 April 1999. <http://jmg64.tripod.com/kpengembangan.hkm.htm>
- Halide, 1981. Pemanfaatan Waktu Luang Rumahtangga Petani di DAS Jeneberang Sulawesi Selatan. Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin Ujung Pandang
- Hairiah, K., M.A. Sardjono dan S. Sabarnudin. 2003. Pengantar Agroforestry. ICRAF. Bogor. 32p
- Hart, R.E., 1978. Allocation Strategis in Rural Javanese Households. Ph.D Thesis (unpublished). Cornell University.
- Huxley, P. 1999. *Tropical Agroforestry*. Blackwell Science Ltd. UK. ISBN 0-632-04047-5. 370p
- ITTO Departemen Kehutanan RI, 2001. Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia. Desentralisasi Sektor Kehutanan (Seri 5 Hasil Laporan Misi Teknis ITTO ke Indonesia). Jakarta. 57p
- Lundgren BO and JB Raintree. 1982. Sustained Agroforestry. In Nestel B (ed). *1982 Agricultural Research for Development. Potentials and Challenges in Asia*. ISBN 90-616-1000-0. The Hague. The Netherlands. 37-49
- Mellor, J.W., 1963. The Use and Productivity of Farm Family Labor in The Early Stage of Economic Development. In : Journal of Farm Economics. Vol.XLV No.3: 498-534
- Nakajima,C., 1963. Subsistence and Commercial Family farm. Some Theoretical Models of Subjective Equilibrium. In Wharton J.R. (eds). *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Aldine Publishing Company. Chicago.
- Siddik,M.; W. Karyadi dan Sukardi, 1999. Studi Perubahan Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani di Kawasan Penambangan Emas Batu Hijau Kabupaten Sumbawa NTB. Fakultas Pertanian Unram, Mataram.
-,2006. Perubahan Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Pada Masyarakat Lokal di Kawasan Tambang PT. Newmont Nusa Tenggara. Journal Agrimensio. Vol.7 No.2 p.134 -147
- Tim PAR Rinjani, 2004. Kaji Tindak Partisipatif Pengelola Sengketa Sumberdaya Alam di Kawasan Rinjani-Lombok-NTB. Mataram,

The res
weaknesses, op
along its value
formulate strat
Tenggara agar
The research
analyzing, and
agribusinesses
external oppor
develop agarv
defensive, as v
and simultane
commodity.

Key words : va

Tujuan dari p
menggambark
Tenggara Bar
memasarkan p
dan daya kom
lokal NTB. Pe
mengumpulka
penelitian me
kelemahan ya
eksternal pad
mengembang